

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTANYA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

Bagi setiap negara pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adalah kewajiban yang harus dilakukan, pemenuhan hak konstitusional harus dijalankan berdasarkan konstitusi yang berlaku. Sebagai penjabaran dari konstitusi, pemerintah memberlakukan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataannya hak konstitusional masyarakat belum dapat terpenuhi terbukti begitu banyak masalah dalam pelaksanaan program BPJS. Sampai saat ini pemerintah belum mampu menghasilkan data yang valid tentang jumlah orang miskin dan tidak mampu, selain itu penyaluran kartu peserta belum dapat didistribusikan dengan baik sehingga berdampak pada minimnya fasilitas layanan di rumah sakit. Berdasarkan fakta tersebut maka, problematika yang muncul terkait pemenuhan kebijakan program BPJS dan perlindungan peserta BPJS ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian pada data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan BPJS Kesehatan. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pemenuhan Hak Konstitusional masyarakat terkait kebijakan program BPJS dan untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum bagi peserta program BPJS ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak konstitusional masyarakat belum dapat terpenuhi terbukti begitu banyak masalah dalam pelaksanaan program BPJS. Permasalahan yang mengemuka selama ini terkait peserta program BPJS dimulai dari validitas data masyarakat di Indonesia, proses registrasi bagi peserta yang terkesan sulit, dan tidak adanya standard operasional terhadap pelayanan bagi peserta program BPJS. Hal ini tidak sesuai dengan ketentaun normatif. Adapun perlindungan hukum yang seharusnya dapat diberikan adalah perlindungan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, perlindungan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dan perlindungan untuk menjamin agar hak-hak asasi warga masyarakat tidak dilanggar dan kepentingannya tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi, yaitu dengan cara mediasi, atau peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum (perdata dan pidana) serta pemenuhan hak sesuai konstitusi dan Undang undang. Terkait hal tersebut maka di perlukan peran pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang standar operasional pelayanan terhadap peserta, melakukan sosialisasi terkait program BPJS beserta melakukan pembaharuan data terhadap masyarakat Indonesia dengan mengkaji secara komprehensif tentang kepesertaan BPJS, dan Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja jajaran manajemen BPJS Kesehatan hingga tingkat kabupaten/kota.

Kata Kunci: BPJS, Hak Konstitusional, Perlindungan Hukum.

**JURIDICAL REVIEW OF BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) (SOCIAL ASSURANCE COORDINATOR AGENCY)
IMPLEMENTATION OF PROGRAM POLICY FOR HEALTH ON
COMPLIANCE OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND LEGAL PROTECTION
FOR PARTICIPANTS IN TERMS OF STATE ADMINISTRATION LAW**

ABSTRACT

For any state, the compliance of public constitutional rights is obligatory to undertake based on the prevailing constitution. As realization of constitution, the government makes law and regulation in the form of Law Number 24 Year 2011 on Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Social Assurance Coordinator Agency) into effect. It is powerful evidence that government have significant commitment to realize social well-being for whole communities. In fact, however, the public constitutional rights have been not satisfied; it is true of very much problems encountered in BPJS program performance. Government today has been not able to produce valid data on the amount of people with poverty and incapacity. In addition, the participant cards cannot yet to distribute properly and, thus, have the impact on minimum service facilities in hospitals. Based on the fact, a set of problems emerging in relation to compliance of BPJS program police and protection of participants are considered from State Administration Law viewpoint.

Method being used in this study is normative juridical approach by emphasizing detailed examination of secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials in relation to BPJS for Health. The study being used in this minithesis is designed to examine and understand legal protection for participants of BPJS program in terms of State Administration Law.

The results of the study shown that public constitutional rights are not yet satisfied; it is true of very much problems encountered in BPJS program performance. So far, the problems emerging in relation to participants of BPJS program are starting by validity of public data in Indonesia, registration process for participant being impressed difficult, and the lack of operational standards on service for participants of BPJS program and, therefore, being in contradiction to normative provision. Some legal protections would have to be provided for are social well-being for whole communities, fulfillment of reasonably their basic requirements, and assured basic rights of community members from violation and prevention of their interests from harm as a result of actions taken by administrative authorities by means of mediation, or state administrative justice or public justice (civil and criminal) as well as fulfillment of rights in accordance with constitution and law. Consequently, as actor, the government is required to pass on Government Regulations about operational standard on service for participants, establishing socialization related to BPJS program and renewal of data on Indonesian people by performing comprehensive investigation of BPJS participation and supervision and evaluation of BPJS management line performance for Health up to regency/municipal level.

Keywords: BPJS, Constitutional Rights, Legal Protection.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19

**BAB II EKSISTENSI NEGARA DAN UPAYA PEMENUHAN HAK
MASYARAKAT BERDASARKAN KONSTITUSI**

A. Negara Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat.....	21
1. Pengertian Negara.....	21
2. Tujuan Negara.....	22
3. Fungsi Negara.....	23
B. Konstitusi Sebagai Dasar Penyelenggara Negara.....	24
1. Pengertian Konstitusi.....	24
2. Kedudukan Konstitusi dalam Negara.....	26
3. Jenis-jenis Konstitusi.....	27
4. Unsur-unsur Konstitusi.....	30
5. Sifat Konstitusi.....	33
6. Tujuan dan Fungsi Konstitusi.....	34
C. Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Masyarakat.....	35
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	35
2. Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM).....	38
3. Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.....	41
4. Hak Konstitusional Masyarakat.....	44
D. Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Hak Konstitusional Masyarakat..	47
1. Hak Konstitusional Atas Jaminan Sosial.....	47
2. Sejarah Jaminan Sosial.....	49

3. Jenis-Jenis Jaminan Sosial.....	51
------------------------------------	----

**BAB III BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF
 INDONESIA**

A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Hukum Positif Indonesia.....	53
B. Pengaturan BPJS Kesehatan dalam Hukum Positif Indonesia.....	58
1. Pengertian BPJS Kesehatan.....	58
2. Peserta Jaminan Kesehatan.....	60
3. Anggota Keluarga yang Ditanggung.....	61
4. Hak dan Kewajiban Peserta.....	62
5. Pendaftaran Menjadi Peserta.....	63
6. Alur Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	77
C. Perlindungan Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum Indonesia.....	79
D. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	83
1. Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial.....	83
2. Peran Pemerintah dalam Pengawasan BPJS Kesehatan.....	84
3. Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Penanganan dan	

	Pengaduan Jaminan Kesehatan.....	85
	4. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa.....	86
	5. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Amanat Konstitusi untuk Menyelenggarakan Jaminan Sosial.....	88
BAB IV	ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BPJS TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTANYA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	
	A. Kebijakan Program BPJS Dikaitkan Dengan Hak Konstitusional...	90
	B. Program BPJS dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.....	108
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	121
	B. Saran.....	122
 DAFTAR PUSTAKA		
CURRICULUM VITAE		

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar Alur Pelayanan BPJS.....	77